

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 08/PRT/M/2017
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA
TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN

(KOP)	
BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH	
Nomor (1)	
Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (2) bertempat di (3) , kami yang bertandatangan di bawah ini:	
1. Nama	:(4)
NIP	:(5)
Jabatan	:(6)
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;	
2. Nama	:(7)
NIP	:(8)
Jabatan	:(9)
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.	
PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan hasil pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan (10) berupa (11) bidang tanah dan dokumen hasil pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pengembalian dana pengadaan tanah Badan Usaha (12).	
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.	
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
..... (13) (14)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi nomor Berita Acara Serah Terima.
- (2) Diisi tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Diisi dengan nama kota/kabupaten penandatanganan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Diisi dengan nama lengkap Kepala Satker.
- (5) Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Satker.
- (6) Diisi dengan jabatan lengkap.
- (7) Diisi dengan nama lengkap pimpinan atau pejabat yang mendapat pendelegasian kewenangan pada LMAN.
- (8) Diisi dengan pimpinan atau pejabat yang mendapat pendelegasian kewenangan pada LMAN.
- (9) Diisi dengan jabatan lengkap pimpinan atau pejabat yang mendapat pendelegasian kewenangan pada LMAN.
- (10) Diisi dengan nama Bendungan.
- (11) Diisi dengan jumlah bidang tanah hasil pengadaan tanah yang diserahkan.
- (12) Diisi nama/identitas Badan Usaha yang dananya digunakan terlebih dahulu untuk pengadaan tanah.
- (13) Diisi dengan nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai pimpinan LMAN atau pejabat yang mendapat pendelegasian kewenangan pada LMAN.
- (14) Diisi dengan nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai Kepala Satker.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat,

JDIH Kementerian PUPR

Siti Martini, SH, M.Si
NIP. 195803311984122001